
PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN DI PROVINSI PAPUA GUNA MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Oleh

Dede Suhendrawan¹, I Nengah Putra Apriyanto², Lukman Yudho Prakoso³, Robby Moehammad Taufik⁴, Ansori⁵, I Nyoman Parwata⁶, Buddy Suseto⁷, Priyanto⁸, Susilo Adi Purwantoro⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Email: [4kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)

Article History:

Received: 05-12-2022

Revised: 17-12-2022

Accepted: 23-01-2023

Keywords:

Ancaman, Keamanan, Pertahanan, Papua, Wilayah

Abstract: Dalam menghadapi potensi ancaman yang dihadapi di wilayah Provinsi Papua, diperlukan adanya penataan wilayah pertahanan agar terwujud suatu ruang, alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. Dalam hal tersebut dapat diwujudkan bilamana sumber daya nasional baik sumber daya manusia, sumber daya alam/buatan maupun sarana prasarana di wilayah Provinsi Papua dapat dibina dan dikembangkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Jenis penelitian Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI menggunakan deskriptif kualitatif dengan wawancara terpusat (*focused interviews*). Desain penelitian yang dipilih merupakan kerangka metode dan teknik penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi penelitian. Pengawasan dan pengamanan garis perbatasan yang terbatas karena kondisi alam, sehingga penataan wilayah pertahanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh karena keterbatasan sarana prasarana. Agar dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya difokuskan pada penangkalan ancaman militer dari negara lain saja tetapi ancaman nir militer yang pelakunya bukan negara (*nonstate actor*) juga menjadi pertimbangan.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau, panjang garis pantai 81.000 km dan

luas perairan 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial; dan 2,8 juta km² perairan nusantara), atau 62% dari luas teritorialnya (Dahuri et al., 2004). Dalam kapasitasnya sebagai negara kepulauan, menempatkan Indonesia yang secara geografis memiliki wilayah berbatasan laut dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia. Sementara itu, Indonesia juga berbatasan di darat dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG). Dengan demikian eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dan memiliki sumber daya yang melimpah memicu konflik kepentingan berbagai pihak sehingga ancaman dari dalam dan luar negeri akan selalu memanfaatkan letak Indonesia sebagai jalur potensialnya.

Provinsi Papua sendiri terletak pada posisi 2^o 25' - 9^o 0' LS dan 130^o 0' - 141^o 0' BT dengan luas wilayah menempati setengah bagian Barat dari Papua New Guinea yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Secara fisik, Provinsi Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia, dengan luas daratan 16,67 % dari total tanah seluruh Indonesia yaitu 315.091,62 Km², membujur dari Barat ke Timur (Nabire-Jayapura) sepanjang 562 Km (337,2 Mile) dan dari Utara ke Selatan (Jayapura-Merauke) sepanjang 736 Km (456 Mile). Provinsi Papua juga memiliki banyak pulau yang berjajar di sepanjang pesisirnya. Di pesisir Utara terdapat pulau Biak Numfor, Yapen dan Mapia. Di sebelah pesisir Selatan terdapat pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak dan Panjang. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dari letak geografis Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Papua bermuara pada besarnya potensi ancaman yang dihadapi baik ancaman militer maupun non militer yang dapat mengganggu integritas kedaulatan NKRI berupa ancaman pelanggaran wilayah, kejahatan lintas negara (*illegal logging, illegal minning, penyelundupan sembako dan senjata serta Muhandak*), pergeseran patok perbatasan, dan pencurian sumber daya alam serta dijadikannya daerah terpencil, perbatasan sebagai daerah basis KKB Papua. Dengan adanya fakta tersebut, maka Indonesia dituntut untuk dapat memperkuat Sistem Pertahanan Negara yang menganut Sistem Pertahanan Semesta melalui pengerahan seluruh sumber daya nasional meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana agar menjadi kekuatan ruang, alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. (Suhirwan, 2018)

Dalam menghadapi potensi ancaman yang dihadapi di wilayah Provinsi Papua, diperlukan adanya penataan wilayah pertahanan agar terwujud suatu ruang, alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. (Prakoso, 2020) Dalam hal tersebut dapat diwujudkan bilamana sumber daya nasional baik sumber daya manusia, sumber daya alam/buatan maupun sarana prasarana di wilayah Provinsi Papua dapat dibina dan dikembangkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. (Nurbantoro, Midhio, Risman, Prakoso, & Widjayanto, 2021) Oleh sebab itu, dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua untuk menghadapi potensi ancaman di wilayah Provinsi Papua dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Papua sebagai daerah yang selama ini banyak tertinggal

jauh dari Provinsi lainnya di Indonesia harus dapat lebih dimaksimalkan dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah didukung oleh TNI dan komponen bangsa lainnya yang terkait. (Pramono & Prakoso, 2021) Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka dalam mengelola sumber daya di daerah diharapkan para Kepala Pemerintahan di daerah mampu menselaraskan dua kepentingan yaitu antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah dengan pengembangan pertahanan wilayah di wilayah Provinsi Papua, sehingga dapat terwujud suatu keselarasan antara pembangunan kesejahteraan dan pertahanan yang pada akhir akan memperkuat Sistem Pertahanan negara Indonesia. Penataan wilayah pertahanan adalah penetapan wilayah pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah pertahanan dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. (Prakoso, Sistem Pertahanan Negara Di Laut, 2021) Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. (Sartono, Prakoso, & Sianturi, 2021)

Mengingat sistim pertahanan negara Republik Indonesia diwadahi dalam Sishanta yang menuntut adanya pemberdayaan segenap sumber daya nasional yang disusun dalam komponen pertahanan negara berupa komponen utama, cadangan dan pendukung dengan memperhatikan nilai-nilai yang bersifat universal melalui pengembangan sumber daya nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan instansi terkait dibawah koordinasi Kemhan RI, maka Provinsi Papua sebagai wilayah yang terletak pada posisi strategis disamping adanya peluang untuk mengakselerasi pembangunan wilayah sejalan dengan semakin besarnya perhatian pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Provinsi Papua juga memiliki tingkat kerawanan apabila sistim pertahanan wilayahnya tidak dapat dikelola dengan baik. (Mulyadi, Prakoso, & Mudhio, 2021). Oleh sebab itu perlu adanya penataan wilayah pertahanan Propinsi Papua dalam menghadapi potensi ancaman. Untuk kepentingan tersebut, maka tesis ini disusun sebagai sumbang pemikiran dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua dalam menghadapi potensi ancaman. (Eka & Hadisancoko, 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI menggunakan deskriptif kualitatif dengan wawancara terpusat (*focused interviews*). Desain penelitian yang dipilih merupakan kerangka metode dan teknik penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi penelitian.

Menurut Cresswell (2016) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua guna menghadapi potensi ancaman dalam rangka menjaga keutuhan NKRI ini penulis mengambil lokasi di Papua dengan pertimbangan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, daerah yang luas namun kepadatan penduduknya masih rendah, memiliki perbatasan laut dan darat dengan negara tetangga, masih terjadi gangguan keamanan dan berpotensi konflik sosial. Waktu penelitian dilakukan November 2022 – April 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah narasumber atau informasi yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu ditentukan oleh peneliti disesuaikan dengan tujuan peneliti. Untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan, maka peneliti menentukan sumber data/informan yang betul-betul mengerti dan memahami terkait tata ruang wilayah pertahanan, kondisi sosial, geografi demografi dan potensi ancaman yang kemungkinan terjadi pada obyek penelitian. Adapun para informan yang ditentukan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Asintel Kasdam XVII Cenderawasih, Asintel Danlantamal X Jayapura, Karoops Polda Papua, Kadisops Lanud Silaspapare, Sekda Provinsi Papua, Kadis PUPR Provinsi Papua.

Obyek atau yang menjadi fokus penelitian ini adalah dari pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang berada di Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyiapan Sarana Prasarana Aspek Udara yang Diharapkan

Mengacu pada PP No 68 tahun 2014 tentang Wilhan dan Permenhan No 22 tahun 2019 tentang RRWP, maka analisa indeks kesiapan sarana prasarana untuk kepentingan TNI AU dalam mendukung OMP berdasarkan hasil *interview* terhadap informan yang berkompeten adalah sebagai berikut:

- a) Pangkalan Operasi. Hasil analisa terhadap fasilitas dan sarana prasarana penyangga sesuai kriteria untuk pangkalan operasi terhadap Pangkalan TNI AU yang ada di Provinsi Papua dihadapkan pada kondisi ideal sesuai kondisi yang mendekati ideal sesuai urutan sebagai berikut:
1. Lanud Manuhua Biak
 2. Lanud Silas Pappare Jayapura
 3. Lanud Yohanes Kapiyau Timika
 4. Lanud Abraham Dimara Merauke

Berdasarkan hasil *interview* kepada informan yang berkompeten, diperlukan daerah penempatan alutsista pertahanan udara berupa *Radar Site* dan *Rudal Site* guna

menghadapai *trouble spot* di wilayah utara Papua sesuai kriteria pertahanan udara dihadapkan pada kondisi ideal, maka diperoleh wilayah yang ideal sebagai berikut:

1. Daerah sekitar Jayapura
2. Daerah sekitar Biak

Berdasarkan hasil interview terhadap informan yang berkompeten kondisi tidak ideal pangkalan udara yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari kriteria fasilitas dan sarana prasarana daerah yang mendukung Pangkalan Operasi/Lanud guna melaksanakan OMP, maka kondisi yang mempengaruhi rendahnya nilai index yaitu kurangnya fasilitas dan akses terhadap depo BBM dan rumah sakit daerah; kurangnya fasilitas dukungan operasi udara seperti hanggar, *taxiway parallel*, gudang amunisi udara, Apron dengan luas yang mencukupi untuk menampung pesawat-pesawat yang akan melaksanakan operasi udara; kurangnya pemenuhan ketentuan Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP); terlalu dekatnya pemukiman warga dengan fasilitas dan instalasi Lanud; dan tidak adanya sarana prasarana umum di sekitar Lanud yang pada kondisi kontinjensi dapat dimanfaatkan sebagai *alternate runway*.
2. Ditinjau dari kriteria daerah yang dapat digunakan untuk penempatan instalasi Rudal jarak menengah maka kondisi yang mempengaruhi rendahnya nilai index yaitu kondisi kontur, sarana jalan pendekat dan pemukiman pendudukan di sekitar alternatif daerah penempatan instalasi Rudal jarak menengah.

Kondisi Dukungan Logistik Wilayah yang Diharapkan.

Sistem pembinaan logistik dapat diselenggarakan secara efektif didukung oleh dukungan Logistik wilayah yang memadai, adanya penggelaran dukungan logistik secara merata dan proporsional pada masing-masing operasi yang dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI di Provinsi Papua sebagai berikut:

Komoditas pertanian. Menurut informan yang berkompeten dalam wawancara yang dilaksanakan dengan peneliti, menyampaikan bahwa banyaknya lahan-lahan pertanian yang masih belum terkelola oleh pemerintah menuntut adanya intensifikasi dan diversifikasi jenis pertanian melalui:

1. Produksi pertanian dilaksanakan melalui 4 pola program pokok penanganan yaitu:
 - a. Intensifikasi dilakukan tanaman pangan, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi petani perhektar.
 - b. Extensifikasi dilakukan dengan mengembangkan luas lahan pertanian yang potensial dan dipadukan dengan program transmigrasi dalam upaya pembukaan lahan pertanian baru. Pada pola ini juga ditunjang dengan menempatkan tenaga penyuluh lapangan bidang pertanian dan meningkatkan kualitas bibit serta sarana pertanian lainnya.
 - c. Usaha Refersifikasi pertanian sebagai upaya untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis dengan tanaman hortikultura serta dengan mengembangkan sentra-sentra produksi buah-buahan; dan
 - d. Defersifikasi pengembangan jenis tanaman dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tujuan untuk (1) Menanggulangi kekurangan pangan dan gizi masyarakat, sehingga tidak akan ada lagi kekurangan pangan dan gizi didaerah setempat; (2)

Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan pertanian; dan (3) Meningkatkan kiprah masyarakat petani dan aparat pemerintah agar mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunan pertanian didaerahnya.

Disamping itu diharapkan Bulog dapat membangun Gudang-Gudang Bulog sampai ke daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan sehingga memudahkan bagi satuan jajaran TNI yang tergelar di Papua untuk mendapatkan beras.

2. Bahan Bakar Minyak. Diharapkan Pertamina dapat mendukung seluruh kebutuhan bahan bakar minyak untuk kepentingan pergeseran pasukan maupun pendorongan logistik serta kegiatan-kegiatan operasi satuan jajaran TNI dari ketiga matra yang tergelar di Provinsi Papua.

Dalam lingkup internal TNI, diharapkan dapat terwujud sistem pembinaan logistik yang efektif dan terpadu antar matra guna mendukung satuan jajaran TNI dari ketiga matra yang tergelar di Provinsi Papua dalam melaksanakan pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, Operasi Pengamanan Perbatasan maupun Operasi Pengamanan Pulau Terluar diindikasikan dengan penyelenggaraan dukungan logistik yang meliputi kegiatan pembekalan, pemeliharaan, angkutan, konstruksi dan kesehatan dilaksanakan secara sederhana, tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta adanya Interoperabilitas antar matra dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih, Koarmada III dan Koopsud III dalam penyelenggaraannya.

Analisis Data

Analisa Faktor Pendukung dan penghambat Penataan Wilayah Pertahanan

Faktor Pendukung

Geografi

- a. Garis perbatasan antar negara RI-PNG telah diakui dan ditetapkan oleh hukum internasional yang merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara.
- b. Keadaan wilayah yang luas dan kondisi tanah yang subur terdapat hampir di seluruh wilayah Papua. Kondisi ini jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi faktor pendukung dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua terutama dalam mendukung logistik wilayah dalam pelaksanaan kampanye militer. Keadaan iklim dan cuaca di wilayah Papua khususnya untuk wilayah barat sangat membantu kegiatan mobilisasi dan program pembangunan yang telah dicanangkan. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya penataan wilayah.

Demografi

- a. Jumlah penduduk yang belum terlalu padat dihadapkan dengan luas wilayah yang ada masih tersedia banyak lapangan kerja yang dapat diciptakan. Hal tersebut menjadi peluang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui penyerapan lapangan kerja.
- b. Penerimaan masyarakat asli Papua terhadap kaum pendatang khususnya di kota-kota besar berjalan dengan baik dan sebagian besar kehidupan masyarakat Papua saling berdampingan namun harus terukur
- c. Peranan kepala suku/ondoafi sangat dominan dan peranan missionaris cukup berpengaruh untuk menggerakkan massa yang dipimpinnya sehingga perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mencegah pengaruh-pengaruh ide separatis.

Sumber Kekayaan Alam.

Sumber kekayaan alam yang melimpah ini menjadi faktor pendukung dalam penataan wilayah pertahanan di provinsi Papua jika dapat dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas SDM penduduk Papua, pemanfaatan teknologi pertanian dan SDA serta menyiapkan sarana prasarana pendukung pengelolaan SDA. Hal ini diperlukan sinergitas program antara TNI, Pemda, Todat dan Tomas. Indikator-indikator kekayaan SDA di Papua sebagai berikut:

- a. Hutan tropis yang luas dapat dijadikan sebagai hutan produktif hampir di seluruh wilayah Provinsi Papua, dan sebagian hutan telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi hutan lindung baik di daerah Kabupaten Jayapura (kawasan *Cycloop*) dan di Kabupaten Merauke;
- b. Program Pemda Provinsi Papua tentang peningkatan produktivitas lahan pertanian dan perkebunan masih terus dilaksanakan;
- c. Pengelolaan pertambangan daerah (PT. FI) dan hasil hutan masih terus berlangsung untuk kepentingan daerah.

Kondisi Ipolesosbud

Program pembinaan Ipolesosbud yang dilaksanakan Pemda perlu dukungan pembinaan teritorial TNI yang bersinergi dengan Tomas dan Todat karena pengarus Todat dan Tomas di wilayah Papua masih sangat berpengaruh. Kegiatan-kegiatan Pemda yang perlu disinergikan dengan kepentingan penataan wilayah pertahanan sebagai berikut: (Prakoso, Duha, Setiadi, & Kusmiati, 2021)

- a. Ideologi. Program pemerintah dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap masyarakat masih terus berjalan;
- b. Politik. Pembinaan terhadap elemen masyarakat di bidang politik masih terus dilakukan oleh Pemda yang diharapkan dapat mewujudkan kegiatan politik yang sehat;
- c. Ekonomi. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi terus digalakkan dan ditingkatkan setiap tahun, potensi wilayah untuk mengembangkan perkebunan cukup besar, hal ini dapat dilihat dari areal yang sangat luas untuk digunakan sebagai daerah perkebunan;
- d. Sosial budaya. Keinginan masyarakat Papua untuk membenahi diri guna mencapai kemajuan kedepan masih sangat besar, hal ini terlihat dengan diterimanya program pemerintah dalam meningkatkan SDM serta makin kondusifnya kehidupan bermasyarakat baik di perkotaan maupun pedalaman.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penataan wilayah pertahanan di provinsi Papua perlu direduksi, agar faktor penghambat ini tidak menjadi kendala dalam upaya penataan wilayah pertahanan, beberapa faktor penghambat dan upaya-upaya untuk mengatasinya sebagai berikut:

Geografi

Dihadapkan pada kondisi geografi wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari hutan, rawa dan sungai, kondisi musim, wilayah pantai memiliki keadaan tanah yang curam, Pengawasan dan pengamanan garis perbatasan yang terbatas karena kondisi alam, sehingga penataan wilayah pertahanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh

karena keterbatasan sarana prasarana, apabila terjadi ancaman di suatu wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat maka pergeseran pasukan dalam rangka penanganannya akan lambat dikarenakan keterbatasan sarana transportasi udara/laut yang dimiliki.

Demografi

Beberapa faktor penghambat dari unsur demografi dan solusinya sebagai berikut:

- a. Masyarakat pedalaman masih banyak yang terpengaruh oleh Ideologi Papua Merdeka yang diperjuangkan oleh GSP P/B, dalam hal ini pembinaan teritorial perlu ditingkatkan dengan mensinergikan unsur-unsur Pemda, Toga dan Tomas yang pengaruhnya masih kuat dalam kehidupan masyarakat di provinsi Papua.
- b. Penyebaran dan kepadatan penduduk $\pm 13,78$ jiwa/Km, dan pemukiman penduduk yang terpencar-pencar didaerah pedalaman atau daerah hulu sungai sangat menyulitkan dalam pembinaan dan penyiapan rakyat terlatih (Wanra), dalam hal ini perlu metode pembinaan secara terpusat di Satkowil-satkowil TNI dengan bekerjasama dengan Pemda setempat.
- c. Pengaruh hukum adat, adat istiadat masih dominan pada masyarakat asli Papua sehingga menimbulkan arogansi terhadap kaum pendatang dan konflik antar suku masih sering terjadi

Sumber Kekayaan Alam

- a. Masih terjadi pelanggaran pengelolaan hutan (*Illegal Logging*), dalam hal ini penegakan hukum dan peningkatan pengawasan perlu dilakukan, keterlibatan POLRI dalam penegakan hukum dan pengawasan *forest ranger* kehutanan Papua yang didukung unsur TNI perlu berkolaborasi dan sinergi. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan pendekatan persuasif melalui Todat, Toga dan tomas yang pengaruhnya masih kuat di wilayah papua;
- b. Program Reboisasi hutan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan belum didukung kualitas SDM yang memadai, dalam hal ini perlu dilaksanakan TOK (*transfer of knowledge*) antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat dengan didukung unsur-unsur pembinaan teritorial TNI, Pemda setempat, Toga, Todat dan Tomas. diakibatkan oleh pelaksanaan fungsi dilapangan;
- c. Pengelolaan tambang yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap Amdal, dalam hal ini penegakan hukum dan peningkatan pengawasan perlu dilakukan, keterlibatan POLRI dalam penegakan hukum dan pengawasan Pemda dan Instansi terkait di Papua yang didukung unsur TNI perlu berkolaborasi dan sinergi.

Kondisi Sosial

Ideologi. Pengamalan ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat sangat terbatas, masih ada sebagian oknum masyarakat yang terpengaruh oleh ide separatis yang selalu ditanamkan oleh kelompok KTSP Papua dan wawasan kebangsaan khususnya pemahaman/pengertian terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa masih sangat rendah khususnya yang berada di daerah pedalaman masih sangat rendah. Dari kondisi tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh KTSP Papua dan simpatisannya untuk menanamkan ide anti NKRI hal ini disebabkan karena beberapa faktor mempengaruhi antara lain: (1) Kondisi masyarakat sendiri yang masih terbelakang; (2) Sikap dan tradisi hidup masyarakat yang tidak menetap di daerah; dan (3) Sikap masyarakat pada umumnya masih sangat terikat dan berpegang pada adat istiadat yang sangat kental. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut perlu upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan ke pelosok daerah, untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik dapat melibatkan TNI didaerah untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik.

Politik

- a. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus terhadap organisasi kemasyarakatan berupa DAP dan LSM karena organisasi tersebut adalah salah satu sarana kelompok KTSP Papua untuk melakukan aktivitas/gerakan (unjuk rasa, rapat, seminar, jumpa pers) dengan selalu mengatasnamakan masyarakat; dan
- b. Perlu memutus *link up* antara KTSP Papua Politik dan KTSP Papua Bersenjata
- c. Perkembangan politik wilayah Provinsi Papua masih diwarnai oleh beberapa kelompok massa yang terobsesi opini Papua merdeka (WPNA/ONPB, KNPB, KNPP, SPP, ILWP, FNMPP, DAP, DKNMB) sehingga arah kegiatannya banyak diwarnai oleh upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI

Ekonomi.

- a. Kebutuhan Sembako dan bahan bangunan masih didatangkan dari luar daerah, disamping itu keterlambatan distribusi menyebabkan biaya ekonomi cukup tinggi. Sedangkan dominasi ekonomi oleh suku pendatang merupakan masalah tersendiri yang dapat mengundang kerawanan sosial khususnya masalah SARA; untuk mengatasi hal ini perlu TOK (*Transfer of knowledge*) dari penduduk pendatang ke penduduk pribumi, untuk mengatasi kemahalan harga sembako perlu perwujudan kebijakan pemerintah di bidang maritim terkait TOL Laut dan memberdayakan sarana angkutan Laut TNI AL dan sarana angkutan Udara TNI AU, disamping itu diperlukan program swasembada pangan dengan melibatkan unsur TNI didalamnya berkerjasama dengan Pemda setempat; (Harris, 2021)
- b. Pembangunan belum merata karena tidak didukung oleh SDM yang baik, Pertumbuhan ekonomi masih lamban dan kebutuhan sembilan bahan pokok masih harus didatangkan dari luar Papua yang akan mempengaruhi perekonomian daerah. Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh golongan ekstrem sebagai sumber isu politik yang mendiskreditkan pemerintah. didalam pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua.

Sosial Budaya

- a. Perbedaan kultur dan budaya, kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan operasi serta terjadinya penurunan nilai kejuangan dan wawasan kebangsaan sebagian masyarakat. Dalam mengatasi hal ini diperlukan pembinaan nilai kejuangan, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dengan Todat, Toga, dan Tomas yang didukung oleh unsur pejabat TNI dan Polri asli putera Papua.
- b. Taraf hidup masyarakat pribumi masih sangat rendah khususnya di daerah pedalaman, tingkat kesehatan masih dibawa standar, pendidikan yang belum memadai dan pengangguran masih cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggal masyarakat yang hidup dipedalaman yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Dalam mengatasi hal ini tidak dapat diserahkan pada pemerintah daerah saja tapi perlu kolaborasi dan sinergi antara TNI dan Polri, Todat, Tomas dan Toga dengan mengerahkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi masing-masing

- c. Sebagian besar penduduk asli Papua masih mempunyai sifat kesukuan yang sangat kuat, perselisihan yang timbul di masyarakat mudah berkembang menjadi perang suku dan kebudayaan penduduk asli Papua belum banyak mendapat pengaruh dari luar daerah dan masih meneruskan cara-cara hidup nenek moyangnya, penduduk pedalaman masih sederhana dan cara berpikirkannya masih sulit menerima perubahan terlalu cepat, sehingga diperlukan perhatian khusus bagaimana memelihara dan meningkatkan kehidupan penduduk asli pedalaman Papua. Dalam mengatasi hal ini perlu dilaksanakan pembinaan masyarakat secara kontinu melalui pembinaan yang terkolaborasi dan bersinergi antara Pemda, TNI dan Polri, Todat, Tomas dan Toga dengan mengerahkan seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi masing-masing.

Pertahanan dan Keamanan

- a. Permasalahan Pertahanan dan Keamanan terkait Alutsista yang dimiliki oleh satuan TNI dari ketiga Angkatan di Provinsi Papua masih terbatas dan terbatasnya jumlah dukungan anggaran dari Komando Atas dan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penyelenggaraan operasi. Permasalahan ini perlu pembahasan ditingkat pemerintah pusat dengan memanfaatkan program unit percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dan kebijakan presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Timur.
- b. Terbatasnya kewenangan formal yang dimiliki oleh TNI dalam menindak lanjuti setiap ancaman non militer yang terjadi di Papua, dan belum terkoordinirnya Sispam Kota dengan Satuan Polri dan Pemerintah daerah setempat. Dalam mengatasi hal ini perlu pembahasan bersama dengan mengenyampingkan ego sektoral dan fokus pada permasalahan bersama yang lebih besar, sehingga tidak terjadi diskresi dan kesalahpahaman di lapangan. Perlu kaji ulang aturan yang ada dan dibuat satu aturan yang dapat mensinergikan seluruh komponen dalam satu tujuan.

Analisis Implementasi Penataan Wilayah Pertahanan Di Provinsi Papua

Langkah Pemda dalam meningkatkan kesiapan wilayah dalam mendukung operasi gabungan di wilayah Provinsi Papua.

1. Kesiapan Sarana Dan Prasarana TNI AD Dalam Mendukung OMP

- a. Membangun sarana jalan kelas I dan II yang dapat menjangkau dan membuka daerah yang masih terisolasi, dan juga diarahkan mendukung kesiapan Pangkalan Militer dan daerah latihan militer TNI AD; dan
- b. Membantu melengkapi fasilitas di pangkalan Militer seperti sarana atau fasilitas air bersih dan membantu menyiapkan lahan untuk digunakan sebagai daerah latihan dengan jumlah luasan yang sesuai dengan kebutuhan latihan TNI AD di Merauke dan Jayapura minimal sampai dengan tingkat Brigade (dalam bentuk hibah tanah/lahan kepada TNI AD) agar dapat mendukung tugas OMP.
- c. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AL dalam mendukung OMP.
- d. Menetapkan kawasan wilayah pertahanan khususnya Pantai Holtekamp, Pantai Saba Maru dan Pantai Biak Selatan sebagai daerah latihan pantai pendaratan ke dalam RTRW dalam bentuk Perda secara permanen.
- e. Melaksanakan sosialisasi perda yang sudah ditetapkan kepada masyarakat adat setempat tentang pentingnya penataan wilayah pertahanan. c) Optimalisasi fasilitas wisata yang sudah ada di daerah Pantai Holtekamp, dapat digunakan untuk

mendukung pertahanan pantai apabila tidak dapat direlokasi. d) Meningkatkan kemampuan fasilitas pangkalan di Merauke dan Timika untuk disiapkan dalam mendukung OMP terutama Faslabuh, Fasharkan dan Faswatpers.

- f. Mengkoordinasikan penggunaan pelabuhan sipil atau swasta untuk sewaktu-waktu digunakan guna kepentingan pertahanan dalam OMP.

Langkah Satkowil dalam meningkatkan kesiapan wilayah dalam mendukung operasi gabungan di wilayah Provinsi Papua

1. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AD dalam mendukung OMP.
 - a. PangdamXVII/Cendrawasih melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TNI AD di daerah yang digunakan sebagai daerah latihan TNI AD agar dapat mendukung tugas OMP; dan
 - b. Pangdam XVII/Cendrawasih melaksanakan koordinasi dengan Pemda untuk menata pembangunan wilayah yang diselaraskan dengan kepentingan pengembangan gelar satuan TNI AD dalam rangka terwujudnya pangkalan militer dan sarana prasana TNI AD lainnya yang mendukung kesiapan tugas OMP.
2. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AL dalam mendukung OMP
 - a. Komandan Lantamal X melaksanakan koordinasi yang ketat dengan Pemda, instansi terkait tokoh agama dan tokoh adat dalam penataan wilayah pertahanan untuk ditetapkan dalam RTRW, khususnya PantaiHoltekamp, Pantai Saba Maru dan Biak selatan.
 - b. Menindaklanjuti keberhasilan operasi Cartens oleh Polda untuk merelokasi masyarakat di Pantai Holtekamp untuk mempertahankan fungsi sebagai pantai pendaratan dan pertahanan pantai.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Pushidrosal untuk mencari dan menentukan alternatif pantai yang memenuhi syarat untuk melaksanakan latihan pendaratan amfibi dan latihan pertahanan pantai, serta dikoordinasikan dengan pemda sebagai pengganti untuk ditetapkan sebagai daerah latihan TNI AL.
 - d. Komandan Lantamal X membantu Pemda dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pentingya penataan wilayah pertahanan TNI AL.
 - e. Komandan Lantamal X mengajukan permohonan ke Komando atas peningkatan fasilitas Pangkalan TNI AL secara berjenjang sehingga mendekati ideal sebagai pangkalan aju untuk mendukung OMP.
 - f. Komandan Lantamal X melaksanakan Binpotmar kepada masyarakat disekitar daerah latihan pendaratan yang sudah ditetapkan sehingga tidak dijadikan pemukiman atau daerah wisata atau kegiatan masyarakat lainnya.
 - g. Menyusun apresiasi pembangunan pertahanan pantai di Pantai Holtekamp mengingat jarak yang dekat dengan fasilitas strategis seperti Lanud Silas Papare.
3. Kesiapan Sarana dan prasarana TNI AU dalam mendukung OMP.
 - a. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memelihara dan meningkatkan kelancaran akses Lanud menuju depo BBM, fasilitas rumah sakit daerah.
 - b. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan isntansi terkait untuk menjaga

perimeter perumahan dan aktivitas warga sekitar Lanud agar tidak mendekati ke fasilitas landasan, taxiway, navaid dan pendukung operasi penerbangan lainnya.

- c. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak bandara untuk menegakkan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- d. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu untuk mengajukan pembangunan fasilitas dukungan operasi udara (Gudang amunisi udara, hangar, *shelter*, *scramble area*).
- e. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu mensinkronkan pembangunan daerah dengan pemerintahan daerah untuk membangun fasilitas umum yang dapat dijadikan alternate runway pada kondisi kontinjensi.
- f. Komandan Lanud Manuhua Biak dan Komandan Lanud Silas Parpure Jayapura perlu untuk menyiapkan rencana daerah pertahanan udara berupa area pembangunan satuan rudal jarak menengah dengan memperhatikan contour, jalan pendekat dan perimeter.

Langkah Pemda dan Satkowil dalam Penyiapan Dukungan Logistik wilayah di Provinsi Papua

- a. Komando Kewilayahan membuat kesepakatan kerjasama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan Pemda Papua di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan untuk program peningkatan kemampuan logistik wilayah.
- b. Komando Kewilayahan bersama dengan Pemda Papua merumuskan *grand strategy/road map* dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di daerah melalui pembukaan lahan pertanian terpadu secara integratif di daerah-daerah serta membentuk Tim Pengawas dan monitoring pelaksanaan *grand strategy/road map* pembukaan lahan pertanian terpadu secara integratif untuk memastikan berbagai program dan kegiatan pembukaan lahan pertanian dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan teknis pembukaan lahan pertanian.
- c. Komando Kewilayahan bersama dengan Pemda Papua merumuskan konsep pembinaan dan pembangunan wilayah dan bekerja sama melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Pertanian Terpadu bersama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dan KLH dalam pembukaan lahan pertanian baru yang tersinkronisasikan dengan program yang disusun oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten); dan
- d. Komando Kewilayahan bersama dengan Pemda Papua, jajaran Bulog dan Pertamina perlu membangun Gudang-gudang beras dan Depo Pertamina/SPBU di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan Papua-PNG.

Pembahasan

Menurut Hogan, R. A. (1952). *A theory of threat and defense. Journal of Consulting Psychology*, Pertahanan dipahami sebagai tanggapan terhadap ancaman dalam rangka mempertahankan diri sebagaimana dipahami dengan menyangkal atau mengubah pengalaman yang mengancam. Selanjutnya Hogan mengemukakan bahwa ancaman memiliki beberapa macam, diantaranya adalah ancaman militer dan non militer. Menurut

Zainudin (2009) dalam teori Kerjasama, Sinergisitas dan Interoperabilitas mengungkapkan bahwa kerja sama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerja sama dalam hal ini adalah kerja sama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan kerja sama antar stakeholder terkait dalam konteks penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua dapat dilakukan dengan:

- a. *Bargaining* yaitu kerja sama antara TNI dengan Polri, Pemda setempat dalam rangka penataan wilayah pertahanan di provinsi Papua dengan memanfaatkan pengaruh, jabatan dan kekuasaan masing-masing berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014
- b. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi. Dalam hal ini perlu kesadaran dari stakeholder terkait bahwa penataan wilayah pertahanan adalah regulasi pemerintah untuk kepentingan bersama sehingga diharapkan terjadi sinergi dan teroperability antara tata ruang daerah dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan yang saat ini masih belum sepenuhnya terlaksana. Sejalan dengan pendapat Charles H. Cooley, penataan wilayah pertahanan yang ideal merupakan kepentingan bersama tidak hanya kepentingan TNI dalam rangka mendukung kampanye militer dalam OMP, terwujudnya penataan wilayah pertahanan yang ideal dapat menjamin stabilitas nasional yang berpengaruh terhadap upaya mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang dicanangkan dalam tujuan program pembangunan daerah provinsi Papua. Dalam penataan wilayah pertahanan di provinsi Papua saat ini telah dilaksanakan melalui komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Pemerintah daerah namun sinergi antara penataan tata ruang daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan belum sepenuhnya terlaksana, demikian halnya interoperabilitas antara tata ruang daerah Papua dengan tata ruang wilayah pertahanan belum optimal dilaksanakan, sumber daya daerah yang ada belum optimal dimanfaatkan dalam upaya penataan wilayah pertahanan.

Selain itu, Koordinasi horizontal ini dapat dilakukan antara Satkowil TNI di Papua dengan Pemerintah daerah setempat sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan penataan wilayah Papua yang dilaksanakan Pemda Papua dengan penataan wilayah pertahanan yang diperlukan oleh TNI. Berdasarkan Teori Pertahanan Semesta, pendekatan keamanan (*security Approach*) harus disatukan dengan mempertimbangkan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity Approach*). Perubahan paradigma tersebut tentunya berpengaruh terhadap konsep pertahanan Negara yang semula menekankan pada upaya mempertahankan stabilitas teritorial mengalami pergeseran pada upaya pemberdayaan wilayah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sehingga memunculkan konsep pertahanan baru yaitu Sistem Pertahanan Semesta. Sistem Pertahanan Semesta adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana seluruh warga negara dan seluruh sumberdaya nasional lainnya dilibatkan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman (semesta mendukung).

KESIMPULAN

Faktor pendukung dan penghambat muncul dari berbagai aspek seperti geografi, demografi, sumber kekayaan alam, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, diperlukan langkah Pemda dalam meningkatkan kesiapan wilayah dalam mendukung operasi gabungan di wilayah Provinsi Papua, kesiapan Sarana Dan Prasarana TNI AD Dalam Mendukung OMP, langkah Pemda dan Satkowil dalam Penyiapan Dukungan Logistik wilayah di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akmal. "Strategi Indonesia Menjaga Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014" Jurnal Jom Fisip Vol.2 No.2 (Oktober 2015) Ayooob, Muhammed. "The Security Problematic of The Third World". Cambridge Journals. Vol 43 No. 2. (Januari 1991)
- [2] Arthur F, Lykke, Jr., 1989. "Toward an Understanding of Military Strategy: Theory and Application" (Carlisle, PA: US Army War College)
- [3] Bambang Sulisty, TSL Toruan dan Surryanto DW, 2020." Penataan Wilayah Pertahanan Darat Aspek Dinamis Dalam Mewujudkan Strategi Pertahanan Berlapis Di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat".
- [4] Barry Buzan, 1991. People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 19.
- [5] Benjamin S. Blanchard, 1997. "Logistics Engineering and Management 6th Edition". (London: Prentice Hall, 1997).
- [6] Budi Susilo Soepandji, 2008. "Bela Negara dan Nilai Luhur Kebudayaan Bangsa Untuk Meningkatkan Etos Kerja Dalam Mendukung Konsepsi Pertahanan negara"
- [7] Dede Mariana, 2006. "Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan".
- [8] Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. dkk. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan Secara Terpadu.2004: hlm. 1.
- [9] Eka, Rantau Isnur; Hadisancoko, Rizerius Eko; Prakoso, Lukman Yudho. (2022) Optimalisasi Sinergitas TNI, POLRI Dan Kemeterian/Lembaga Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI. Jurnal Inovasi Penelitian.
- [10] Etta Mamang Sangaji, Dr. M. Si, Sopiah, Dr., M.M., S.Pd., 2010, Metodologi Penelitian: pendekatan Praktis dalam Penelitian, Andi Offset, Yogyakarta.
- [11] George, R. Terry dan Leslie, W. Rue. "Dasar-Dasar Manajemen".(Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- [12] Gubernur Papua, 2022. Materi pembekalan kepada Pasis Dikreg XLIX Sesko TNI TA.2022. Jayapura
- [13] Handyaningrat, Soewamo.1985. "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", Jakarta: PT Gunung Agung.
- [14] Handoko, T Hani. 2003. Manajemen. BPFE - Yogyakarta (2003). Pruitt, Dean G. dan Rubin, J. Z. 2004. "Teori Konflik Sosial". penerjemah Helly P. Soetjipto, Pustaka Pelajar.
- [15] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka. Journal of Social and Political Sciences, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30.
- [16] James V. Jones, Integrated Logistics Support Handbook 2nd, (California: McGraw-Hill, Inc., 1994), hlm.4

-
- [17] Lantamal X/Jayapura. Materi pembekalan pada Pasis Dikreg XLIX Tahun 2022. Jayapura.
- [18] Makodam XVII/Cendrawasih, 2022. RUTR Wilayah Pertahanan Kodam XVII/Cendrawasih. Jayapura.
- [19] Makodam XVII/Cendrawasih. 2022. Analisa Daerah Operasi Kodam XVII/Cendrawasih. Jayapura.
- [20] Mapolda Papua, 2022. Intelijen Dasar Polda Papua, Jayapura
- [21] Monteressoro, Francesco. "Reform and Modernization Of The Indonesian forces". Jurnal Analisis ISPI No. 268 (Juli 2014)
- [22] Mulyadi, Mulyadi; Prakoso, Lukman Yudho; Mudhio, I Wayan. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. Jurnal Inovasi Penelitian.
- [23] Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. Pendidikan Tambusai.
- [24] Pasis Dikreg Sesko TNI 49.2022. Laporan KKSDN. Sesko TNI, Bandung 2022.
- [25] Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan wilayah Pertahanan Negara, Jakarta.
- [26] Prakoso, L. Y. (2020). penguatan pertahanan negara melalui peningkatan keamanan laut di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- [27] Prakoso, L. Y. (2021). Sistem Pertahanan Negara Di Laut.
- [28] Prakoso, L. Y., Duha, J., Setiadi, M. I., & Kusmiati. (2021). Perang ekonomi. CV. Aksara Global Akademia.
- [29] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense.
- [30] Sartono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Kebijakan Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut. Strategi Pertahanan Laut.
- [31] Sekretariat Negara RI, 2015, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- [32] Sekretariat Negara RI, 2019. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Jakarta.
- [33] Sekretariat Negara RI., 2021. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Jakarta,
- [34] Soekanto, Soerjono. 1986. "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1986).
- [35] Soetomo. 1995. "Masalah Sosial dan Pembagunan". PT. Dunia Pustaka Jaya.
- [36] Sugiyono. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi" (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Sekretariat Negara RI, 2021.
- [37] Suhirwan, L. Y. (2018). Strategi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara Tahun 2017. Indonesia Qualitative Reseach Association (IQRA).
- [38] Universitas Pertahanan. 2021. "Pedoman Penyusunan Tesis". Sentul Bogor (2021)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN